



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, diperlukan penetapan formasi dan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 105);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 106);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 107);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 108);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 110);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 111);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 113);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 115);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 116);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 118);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 119);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 120);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 122);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 123);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 124);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 125);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 126);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 127);
40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 128);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 129);

42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 130);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Pendidikan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 131);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Puskesmas Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 132);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 133);
46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 134);
47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Kebersihan, Pertamanan, dan Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 135);
48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 136);
49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Pengamatan Pengairan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 137);



50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Metrologi Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 138);
51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Pengelolaan Pupuk Organik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 139);
52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Rumah Potong Hewan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 140);
53. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 141);
54. Peraturan Bupati Bantul Nomor 142 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Balai Benih Pertanian Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 142);
55. Peraturan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Balai Benih Ikan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 143);
56. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 144);
57. Peraturan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 145);
58. Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 146);

59. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara.
3. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
6. Ringkasan Tugas Jabatan adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat, yang dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.

7. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu yang berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
8. Pangkat adalah tingkat kedudukan seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
10. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
11. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.

## Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.

- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## BAB II FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN

### Pasal 3

Formasi dan Hasil Analisis Jabatan berupa Nama Jabatan dan Uraian Jabatan serta jumlah pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX dan Lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2015 tentang Hasil Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 97).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Juli 2018  
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

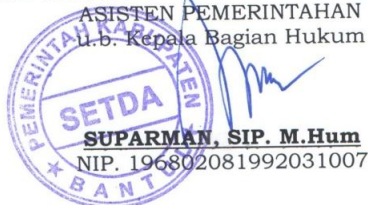
Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 89

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.e. Kepala Bagian Hukum



**DAFTAR LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR   TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1  | LAMPIRAN I     | : FORMASI JABATAN DI LINGKUNGAN<br>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  |
| 2  | LAMPIRAN II    | : HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIS<br>DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI BUPATI                                 |
| 3  | LAMPIRAN III   | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN BANTUL         |
| 4  | LAMPIRAN IV    | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL    |
| 5  | LAMPIRAN V     | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN HUKUM<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL                                |
| 6  | LAMPIRAN VI    | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN BANTUL         |
| 7  | LAMPIRAN VII   | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN BANTUL          |
| 8  | LAMPIRAN VIII  | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN LAYANAN<br>PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN BANTUL |
| 9  | LAMPIRAN IX    | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL |
| 10 | LAMPIRAN X     | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN<br>ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH<br>KABUPATEN BANTUL                        |
| 11 | LAMPIRAN XI    | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN UMUM<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL                                 |
| 12 | LAMPIRAN XII   | : HASIL ANALISIS JABATAN BAGIAN HUBUNGAN<br>MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN BANTUL  |
| 13 | LAMPIRAN XIII  | : HASIL ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DPRD<br>KABUPATEN BANTUL   |
| 14 | LAMPIRAN XIV   | : HASIL ANALISIS JABATAN INSPEKTORAT<br>KABUPATEN BANTUL  |
| 15 | LAMPIRAN XV    | : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br>KABUPATEN BANTUL                        |
| 16 | LAMPIRAN XVI   | : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN<br>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN<br>KABUPATEN BANTUL                 |
| 17 | LAMPIRAN XVII  | : HASIL ANALISIS JABATAN BADAN KEUANGAN<br>DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL                                 |
| 18 | LAMPIRAN XVIII | : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KESEHATAN<br>KABUPATEN BANTUL  |
| 19 | LAMPIRAN XIX   | : HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERTANIAN,<br>PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>KABUPATEN BANTUL             |

20	LAMPIRAN XX	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
21	LAMPIRAN XXI	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
22	LAMPIRAN XXII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
23	LAMPIRAN XXIII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
24	LAMPIRAN XXIV	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL
25	LAMPIRAN XXV	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
26	LAMPIRAN XXVI	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANTUL
27	LAMPIRAN XXVII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
28	LAMPIRAN XXVIII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL
29	LAMPIRAN XXIX	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
30	LAMPIRAN XXX	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
31	LAMPIRAN XXXI	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL
32	LAMPIRAN XXXII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANTUL
33	LAMPIRAN XXXIII	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
34	LAMPIRAN XXXIV	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL
35	LAMPIRAN XXXV	: HASIL ANALISIS JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL
36	LAMPIRAN XXXVI	: HASIL ANALISIS JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
37	LAMPIRAN XXXVII	: HASIL ANALISIS JABATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
38	LAMPIRAN XXXVIII	: HASIL ANALISIS JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
39	LAMPIRAN XXXIX	: HASIL ANALISIS JABATAN KECAMATAN
40	LAMPIRAN XL	: HASIL ANALISIS JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL